

Peran Belanja Daerah dalam Meningkatkan Kesejahteraan dan Pembangunan Masyarakat

Anita Dewi Anggraini
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
anitadewianggrn@gmail.com

ABSTRACT

economy in general as a progress that leads to an increase in the per capita income of the country, while at the same time improving the institutional system for example (economic, political, legal, social or cultural). National development has a goal, one of which is as an integral part of national development, therefore the need for appropriate regional economic growth so that the goals of national economic growth will be achieved. According to the term, economic development itself is involved in efforts such as increasing the standard of living in a country which is usually measured by the low level of per capita income. The purpose of this paper is to examine the correlation between regional spending on welfare and community development through a literature review, therefore it is important to understand and overcome problems in facing challenges to support community welfare and help achieve maximum economic development.

Keywords: *Regional Spending, Community Welfare, Economic Growth*

Abstrak

ekonomi secara umum sebagai kemajuan yang mengarah pada peningkatan pendapatan per kapita negara, sekaligus memperbaiki sistem kelembagaan misalnya (ekonomi, politik, hukum, sosial atau budaya). Pembangunan nasional mempunyai tujuan, salah satunya sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, oleh karena itu diperlukan pertumbuhan ekonomi daerah yang sesuai agar tujuan pertumbuhan ekonomi nasional dapat tercapai. Menurut istilahnya, pembangunan ekonomi itu sendiri menyangkut upaya-upaya seperti peningkatan taraf hidup suatu negara yang biasanya diukur dengan rendahnya tingkat pendapatan per kapita. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengkaji korelasi antara belanja daerah untuk kesejahteraan dan pembangunan masyarakat melalui kajian literatur, oleh karena itu penting untuk memahami dan mengatasi masalah dalam menghadapi tantangan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan membantu mencapai pembangunan ekonomi yang maksimal.

Kata Kunci: Belanja Daerah, Kesejahteraan Masyarakat, Pertumbuhan Ekonomi

LATAR BELAKANG

Menurut (Todaro, 2000) pertumbuhan ekonomi adalah daya sebuah negara untuk meningkatkan kapasitas jangka panjangnya seperti menyediakan bermacam-macam barang kepada rakyatnya. Peningkatan kapasitas ini biasanya disebabkan oleh kemajuan perkembangan teknologi institusi maupun ideologi terhadap kondisi kerangka kerja yang ada. Sedangkan pembangunan ekonomi secara umum didefinisikan sebagai suatu progres yang mengarah pada peningkatan pendapatan per kapita negara tersebut, sementara pada saat yang sama memperbaiki sistem kelembagaan misalnya. Sistem ini dapat dilihat dari dua sudut, yaitu peningkatan perspektif pada Lembaga/organisasi (institusi) dan peningkatan perspektif pada bidang regulasi, baik itu formal ataupun informal (Arsyad, 1999).

Tujuan dari proses pembangunan nasional salah satunya ialah sebagai bagian integral pengembangan nasional, oleh sebab itu perlunya progres ekonomi daerah yang tepat sehingga tujuan pertumbuhan ekonomi nasional akan tercapai. Menurut istilah, pembangunan ekonomi sendiri ialah mencakup upaya sebagaimana seperti peningkatan taraf standar hidup pada suatu negara yang biasanya diukur dari peningkatan dan penurunan suatu pendapatan riil perkapita. Selain itu, pembangunan ekonomi juga harus mampu menumbuhkan produktivitas misalnya

Received November 30, 2022; Revised November 2, 2022; November 22, 2022

*Corresponding author, e-mail address

Peran Belanja Daerah dalam Meningkatkan Kesejahteraan dan Pembangunan Masyarakat

seperti memberikan suatu pembinaan ataupun pelatihan keterampilan bagi setiap individu agar sumber daya alam yang ada disekitar mereka dapat terkelola dengan baik (Nalle & Hidayat, 2015).

Kita tarik saja contoh dari pulau Jawa tepatnya provinsi Jawa Timur yang merupakan Provinsi dimana memiliki citra baik, dibuktikan dengan menduduki posisi PDRB tertinggi setelah DKI Jakarta yang dimana provinsi tersebut merupakan ibu kota negara. Provinsi Jawa Timur juga turut aktif berkontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi setidaknya dalam lima tahun terakhir (2013-2017) yang dapat ditunjukkan tabel di bawah ini:

Tabel 1. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 provinsi di Pulau Jawa Tahun 2013-2017

PDRB (dalam Milyar Rupiah)	DKI Jakarta	Jatim	Jabar	Jateng	Banten	DI Yogyakarta
2013	1 296 964,57	1 192 789,80	1 093 543,55	726 655,12	331 099,11	75 657,45
2014	1 373 389,13	1 262 684,50	1 149 216,06	764 959,15	349 351,23	79 536,08
2015	1 454 563,85	1 331 376,10	1 207 232,34	806 765,09	368 377,20	83 474,45
2016	1 540 078,20	1 405 561,04	1 275 527,64	849 313,20	387 824,35	87 688,20
2017	1 635 855,75	1 482 147,59	1 342 953,38	894 050,47	409 959,69	92 300,66

Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2019)

Teguh Pramono selaku kepala Badan Pusat Statistik Jawa Timur saat ditemui dikantornya tepatnya di Surabaya mengungkapkan bahwa Jawa Timur turut menyumbang Pertumbuhan PDRB atas harga berlaku sebesar 14,61 persen pada tahun 2017 terhadap PDB yakni sebanyak Rp. 13.065,5 triliun. Sementara di sisi lain PDRB Jawa Timur atas dasar harga konstan mencapai mencapai Rp. 1.482,15 triliun pada tahun 2017 meningkat sebesar Rp. 76,91 triliun dari PDRB sejumlah Rp. 1.405,57 triliun di tahun 2016. Tidak hanya itu PDRB harga konstan Jawa Timur juga memberikan sumbangan sebesar 17,43 persen dari PDB nasional sebanyak Rp. 9.530,30 triliun pada tahun 2017 (Kominfo Jatim, 2018).

Dalam hal ini kebijakan fiskal diperlukan dengan tujuan untuk menstabilkan harga, tingkat produksi, dan kesempatan kerja, serta untuk merangsang maupun menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu peran maupun intervensi pemerintah tetap dibutuhkan yakni jika perekonomian diatur sepenuhnya melalui pemrograman ekonomi pada pasar bebas, ada juga stabilitas kegiatan ekonomi mungkin belum terealisasi namun dengan fluktuasi kegiatan ekonomi yang besar dari periode satu ke periode lain akan mengakibatkan efek pada kesempatan kerja, pengangguran pada masyarakat, maupun tingkat harga. Realisasi belanja pemerintah provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini.

tabel II. realisasi Belanja pemerintah Provinsi Jawa Timur

Tahun	Nilai Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung
2015	22 946 307 569 746
2016	23 859 953 926 118
2017	28 878 134 635 610

Sumber: (Survei Statistik Keuangan Daerah, 2019)

Dilansir dari data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa timur menyatakan bahwa realisasi belanja pemerintah Jawa timur mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2015 sebesar 22.946.307 juta rupiah; tahun 2016 sebesar 23.859.954 juta rupiah; dan pada tahun 2017 sebanyak

28.878.135. dari sini dapat dilihat bahwa setiap tahun kegiatan yang dibiayai oleh pemerintah semakin meningkat, dimana diharapkan dari adanya kegiatan tersebut bisa memberikan manfaat berupa kesejahteraan bagi masyarakat. Tujuan dari penulisan ini ialah untuk mengkaji pengaruh belanja daerah terhadap kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi melalui kajian literatur oleh karena itu pentingnya identifikasi dan pemahaman yang dihadapi daerah dalam mengelola pengeluaran untuk mendukung kesejahteraan masyarakat serta membantu mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal, menyusun dan memantau kebijakan, pedoman dan penilaian untuk memastikan bahwa pengelolaan belanja daerah berjalan dengan baik sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi secara maksimal.

KAJIAN TEORITIS

Menyaksikan kondisi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang memberikan partisipasi secara signifikan terhadap Perekonomian nasional, memperlihatkan jika program ekonomi di sana bisa menjadi penyangga akan perekonomian nasional. Pada bidang perdagangan dan industri mampu memainkan peranan yang cukup besar oleh karena itu sektor ini mampu berkontribusi dengan baik atas pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional. Pertumbuhan ekonomi Jawa timur diperkirakan akan semakin meningkat pada tahun 2018 yang diharapkan dapat menjadi tahun politik. Di tahun 2017 laju pertumbuhan ekonomi Jawa timur sebesar 5,45 persen jika dilihat dari sisi produksinya, namun pertumbuhan PDRB didorong oleh banyak sektor usaha penyedia, dengan pertumbuhan terendah hingga yang tertinggi misalnya seperti informasi komunikasi sebesar 6,92 persen, industri tambang dan galian sejumlah 7,47 persen, disusul oleh penyedia akomodasi dan makanan dan minuman yaitu 7,91 persen.

Adanya pencapaian pertumbuhan ekonomi yang baik di provinsi Jawa Timur membuat Pemerintah daerah terdorong untuk selalu memastikan bahwa masyarakatnya dalam keadaan sejahtera dan makmur. Dengan melakukan kegiatan perekonomian maka kesejahteraan masyarakat dapat mudah dicapai, salah satu cara agar kegiatan ekonomi dapat berlangsung yaitu dengan melalui belanja pemerintah.

Pertumbuhan ekonomi dan belanja pemerintah sangat erat kaitannya dikarenakan belanja pemerintah sendiri memiliki beberapa komponen dalam penyusunan Produk Domestik Bruto atau biasa disebut dengan PDRB (di tingkat regional) yang sejalan dengan pengeluaran untuk public, investasi, maupun net ekspor.

Pengeluaran pemerintah menurut (Sukirno, 1994) merupakan komponen dari kebijakan fiskal dimana, pemerintah ikut menyusun aliran perekonomian dengan menetapkan pendapatan dan belanja pemerintah setiap tahun, hal ini terlihat dalam dokumen (APBN) hingga untuk anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

METODE PENELITIAN

Penulisan ini bersifat deskriptif yang dimana menggunakan pendekatan studi kepustakaan, karena menggunakan teknik pengumpulan data yang bersumber dari berbagai literatur. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui apakah belanja daerah berdampak positif dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan data beserta informasi fakta yang ada. Penulisan ini memakai data sekunder yang berasal dari buku, jurnal, dan literatur lainnya

HASIL DAN PEMBAHASAN

Seperti yang telah dipaparkan dalam pendahuluan, Jawa Timur merupakan salah satu pilar kekuatan perekonomian di Indonesia, hal ini dibuktikan dalam aktivitas ekonomi yang telah berhasil menyokong hampir 15 persen PDRB nasional setelah provinsi DKI Jakarta. Secara administratif Provinsi Jawa timur ini terdiri dari 9 kota dengan 29 kabupaten, 666 kecamatan, dan 8.501 kelurahan/desa. Dalam mengelola ini semua tidak luput dari adanya dana APBD yang bersumber dari pemerintah. Lajunya suatu pembangunan daerah yang melibatkan kegiatan fiskal juga membutuhkan pembiayaan yang berasal dari pemerintah negara, hal ini menyebabkan belanja pemerintah daerah menjadi bertambah, belanja ini mencukupi pengeluaran pembangunan dan pengeluaran rutin. Belanja (pengeluaran) pemerintah daerah sebagaimana APBD adalah

Peran Belanja Daerah dalam Meningkatkan Kesejahteraan dan Pembangunan Masyarakat

agenda teratur dari pengeluaran kas daerah guna mendanai program operasional di ruang lingkup pemerintah. Seiring dengan meningkatnya pengeluaran, begitu pula kebutuhan akan sumber daya yang signifikan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah daerah. Belanja daerah merupakan alokasi yang dilaksanakan secara efektif dan efisien, yang menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintah daerah.

Kendala dalam Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan sarana guna menyelenggarakan tujuan strategis pemerintah seperti memberikan layanan yang baik kepada masyarakat maka dari itu pelaksanaan pengelolaan belanja pemerintah haruslah terstruktur diawali dengan perencanaan hingga pemantauan di setiap program dan kegiatannya agar bisa terwujudnya pengelolaan APBD yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dalam pelaksanaan anggaran perlu sekali adanya prosedur/mechanisme guna pemantauan tindak lanjut hingga rekomendasi audit internal.

Urusan pemerintah terdiri dari urusan yang bersifat wajib dan sukarela. Penyusunan biaya pelaksanaan hal-hal yang bersifat wajib didasarkan pada standar pelayanan yang sudah ditentukan. Provinsi Jawa timur pemerintah memiliki program dan kegiatan masing-masing yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas daerah, satuan kerja perangkat daerah, dan perencanaan anggaran, serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran sehingga bisa tepat sasaran kinerja belanja. Namun ini semua tidaklah bisa berjalan dengan mulus karena biasanya ada kendala, umumnya kendala yang dihadapi daerah adalah pelaksanaan belanja daerah yang tidak tepat waktu, misalnya seperti:

- Keterlambatan dalam penetapan aturan APBD daerah yang mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan tersebut
- Terjadinya kegagalan lelang, yang akhirnya menghambat penyerapan dan kinerja anggaran
- Dan yang terakhir belum berakhirnya pembebasan tanah dan kegiatan lainnya yang sedang berlangsung (kementerian Keuangan).

Masalah seperti keterlambatan penetapan APBD ini seharusnya sinkron dengan APBN, hal yang menjadi penghambat adalah karena terdapat daerah-daerah yang pengambilan keputusannya sangat terlambat. APBD haruslah dibuat untuk kepentingan umum. Siklus APBD sama dengan siklus APBN yang tiap tahapannya terdapat perencanaan, penganggaran, pembahasan, dan penetapan, tetapi Menkeu menjelaskan jika masih ada tumpang tindih di antara APBN dan APBD. Dalam tahap perencanaan memerlukan analisis/studi kelayakan

Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Belanja Daerah Untuk Kesejahteraan Masyarakat Dan Pertumbuhan Ekonomi

Dalam mencapai kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia, diperlukan sebuah program pembangunan yang berkelanjutan dan terkoordinasi yang direncanakan oleh kementerian bersama dengan pemerintah daerah. Pemerintah telah mengidentifikasi kesejahteraan manusia sebagai salah satu prioritas. Pemimpin daerah berperan penting dalam pengoptimalan dana APBN dan APBD untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Hal ini karena pemerintah pusat telah memberikan banyak sumber daya misalnya seperti dana kepada daerah yang digunakan sebagai peningkatan kemakmuran rakyatnya, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menurunkan angka kemiskinan pada daerah setempat. Tak hanya itu, pemerintah daerah (Pemda) didorong untuk berinovasi, misalnya dengan membuat perubahan, contohnya seperti pemerintah daerah diharuskan mempertimbangkan penerbitan obligasi daerah dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga swasta dan masyarakat juga untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat itu sendiri yang berfokus pada kaum rakyat menengah kebawah agar manfaat APBN dan APBD benar-benar bisa dirasakan oleh rakyat di Indonesia.

Sektor pada strategi keuangan, seperti penyusunan APBD harus dilakukan baik melalui prakiraan ekonomi makro, prakiraan fiskal, prakiraan sensitivitas fiskal makro, analisis dampak fiskal dan strategi fiskal, pendekatan belanja jangka menengah daerah, dan prakiraan anggaran dengan RPJMD dan RKPD. Hal ini sangat penting untuk meringankan pemerintah daerah

mengalokasikan APBD agar dapat mencapai visi dan misi yang diharapkan. Ketika ada kegagalan untuk melakukan hal tersebut maka akan berdampak pada perencanaan dan anggaran dalam program ataupun kegiatannya yang menjadikan tidak akurat yang ,menyebabkan tidak tercapainya tujuan dalam pembangunan manusia secara berkelanjutan. Dampak nyatanya ialah seperti adanya ketidaksinambungan program untuk mencapai maksud dan tujuan yang ada dalam RPJMD, sehingga menghasilkan pemotongan anggaran OPD atau pengalihan anggaran untuk program lain.

Pada sektor lembaga swasta dan masyarakat. Perlunya pemerintah melakukan dorongan untuk berparatisipasi dalam upaya peningkatan tarafa kesejahteraan dan pembangunan masyarakat. Karena keterbatasan dana pemerintah maka kontribusi masyarakat ini sangat dibutuhkan dalam upaya yang sudah dijelaskan tadi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penulisan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa belanja daerah berpengaruh positif terhadap kesejahteraan dan pembangunan ekonomi, namun dalam mendistribusikan belanja daerah hingga sampai kepada masyarakat masih terdapat beberapa kendala sehingga masyarakat manfaatnya masih belum bisa dirasakan banyak masyarakat. Kendala tersebut misalnya seperti keterlambatan dalam penetapan aturan APBD daerah yang mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan tersebut, terjadinya kegagalan lelang, yang akhirnya menghambat penyerapan dan kinerja anggaran, dan yang terakhir belum berakhirnya pembebasan tanah dan kegiatan lainnya yang sedang berlangsung, namun pemerintah juga tidak diam, pemerintah daerah (Pemda) tetap didorong untuk berinovasi, misalnya dengan membuat perubahan, contohnya seperti pemerintah daerah diharuskan mempertimbangkan penerbitan obligasi daerah dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga swasta dan masyarakat juga untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat itu sendiri yang berfokus pada kaum rakyat menengah kebawah agar manfaat APBN dan APBD benar-benar bisa dirasakan oleh rakyat di Indonesia.

SARAN

Saran yang bisa disampaikan mengenai publikasi penulisan berikutnya ialah pemerintah daerah lebih mengamati pengeluaran dalam negeri baik pendidikan maupun di bidang Kesehatan publik agar tujuan mensejahterakan bisa terdistribusikan dengan baik. Pemerintah perlu menyadari tingkat Pendidikan, yang merupakan faktor penting untuk mendukung progress pembangunan suatu negara. Tingginya tingkat pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan sangat mempengaruhi tingkat pembangunan pada bidang tersebut, dengan cara meningkatkan besaran siswa yang dapat menuntaskan pada jenjang yang lebih tinggi membuat semakin tinggi rata-rata tingkat pengetahuan dan keterampilan masyarakat, dapat dipastikan semakin mudah pula penduduk pada usia kerja bisa memahami, mengimplementasikan dan memperoleh hasil sehingga meningkatnya standar ekonomi nasional

DAFTAR REFERENSI

- Arsyad, L. (1999). *Ekonomi Pembangunan*. STIE YKPN.
- Badan Pusat Statistik. (2019). *PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Provinsi (Miliar Rupiah), 2013-2017*. BPS Provinsi Jawa Timur. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Provinsi (Miliar Rupiah), 2013-2017
- kementerian Keuangan. (n.d.). *Kendala Belanja Daerah*. Kemenkeu.Go.Id. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?ufa=kendala-dihadapi-daerah-dalam-pelaksanaan-belanja-daerah>
- Kominfo Jatim. (2018). *Pada 2017, PDRB Jatim Atas Harga Berlaku Rp 2.019,2 Triliun*. Kominfo Jatim. <http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/pada-2017-pdrb-jatim-atas-harga-berlaku-rp-2-019-2-triliun>
- Badan Pusat Statistik. (2019). *PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Provinsi (Miliar*

Peran Belanja Daerah dalam Meningkatkan Kesejahteraan dan Pembangunan Masyarakat

- Rupiah*), 2013-2017. BPS Provinsi Jawa Timur. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Provinsi (Miliar Rupiah), 2013-2017
- kementerian Keuangan. (n.d.). *Kendala Belanja Daerah*. Kemenkeu.Go.Id. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=kendala-dihadapi-daerah-dalam-pelaksanaan-belanja-daerah>
- Kominfo Jatim. (2018). *Pada 2017, PDRB Jatim Atas Harga Berlaku Rp 2.019,2 Triliun*. Kominfo Jatim. <http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/pada-2017-pdrb-jatim-atas-harga-berlaku-rp-2-019-2-triliun>
- Nalle, F. W., & Hidayat, A. S. (2015). Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah, Tenaga Kerja, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2015. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(1), 72–86.
- Sukirno, S. (1994). *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. Raja Grafindo Persada.
- Survei Statistik Keuangan Daerah. (2019). *Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Timur Menurut Jenis Belanja*. BPS Provinsi Jawa Timur. <https://jatim.bps.go.id/statictable/2019/10/09/1638/realisasi-belanja-pemerintah-provinsi-jawa-timur-menurut-jenis-belanja-ribu-rupiah-2015-2018-.html>
- Todaro, M. (2000). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Erlangga.